



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Target Produksi Garam Rakyat 1,5 Juta Ton pada 2022
Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Target Produksi Garam Rakyat 1,5 Juta Ton pada 2022 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan produksi garam rakyat sebesar 1,5 juta ton tahun 2022. Adapun impor garam direncanakan mencapai 2,9 juta ton. Penetapan target tersebut tak terlepas dari rendahnya produksi pada tahun 2021. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi produksi garam nasional tahun 2021 berkisar 1,3 juta ton atau hanya 61,9 persen dari target produksi 2,1 juta ton. Rendahnya produksi, antara lain, dipicu musim kemarau basah. Direktur Jasa Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda mengemukakan, musim kemarau basah diprediksi berlanjut pada 2022 sehingga akan membuat produksi garam rakyat tidak optimal. Dengan faktor hambatan cuaca itu, tahun ini pemerintah merencanakan impor garam sebesar 2,9 juta ton. Produksi garam rakyat yang ditargetkan sebesar 1,5 juta ton tahun ini dan stok garam sisa produksi tahun lalu sekitar 430.000 ton akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi, industri, dan industri aneka pangan. Kebutuhan garam konsumsi sekitar 1,5 juta ton per tahun dan garam industri 3,07 juta ton. Produksi garam rakyat kualitas I diharapkan bisa mencapai 500.000 ton atau 30 persen dari total produksi tahun ini sehingga dapat menyuplai kebutuhan industri. "Tantangannya adalah intensifikasi teknologi agar (garam) tetap berproduksi pada musim hujan. Sejumlah teknologi telah diaplikasikan, tetapi pemanfaatannya belum merata karena ongkos produksi yang mahal. Sementara anggaran pemerintah terbatas," kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/1/2022). Di sisi lain, semangat petambak garam untuk berproduksi terpukul harga jual garam yang tidak menentu. Pihaknya berharap impor garam tidak mengalir di masa panen raya garam hingga dua bulan setelah masa panen, yakni Juli 2022-Januari 2023, supaya tidak menggerus serapan garam rakyat dan memukul harga garam rakyat. "Agar tidak menggerus petambak, impor garam jangan berlangsung saat panen raya hingga dua bulan setelah masa panen garam," katanya. Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden tentang percepatan pembangunan per-garaman, yang diharapkan menjadi solusi pengembangan industri garam nasional. Dengan regulasi itu, keterlibatan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan untuk mencapai target swasembada garam konsumsi dan garam industri aneka pangan pada tahun 2024. Kebutuhan garam konsumsi dan garam industri aneka pangan setiap tahun diperkirakan sekitar 2,2 juta ton. Untuk mendukung hilirisasi, lanjut Huda, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini berencana membangun satu pabrik pencucian dan pemurnian (washing plant) garam di Tuban. Sebelumnya, pemerintah telah membangun sejumlah washing plant, di antaranya di Karawang, Brebes, Indramayu, Pati, Gresik, Pasuruan, dan Sampang. Pabrik pencucian garam itu diharapkan mendorong sentra produksi garam rakyat mengembangkan industri pengolahan sendiri. Membaik Sementara itu, Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur Mohammad Hasan memproyeksikan produksi garam rakyat justru akan membaik tahun ini. Produksi garam rakyat diharapkan bisa mendekati 3 juta ton tahun ini atau seperti capaian tahun 2019. Ia mengemukakan, anomali cuaca pada tahun 2021 telah menyebabkan produksi garam di Jawa Timur hanya sekitar 450.000 ton atau turun hingga 50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, di tengah produksi yang merosot, harga garam di tingkat petambak yang semula anjlok Rp 400 per kilogram membaik dan kini menyentuh Rp 800 per kg. Sementara itu, harga eceran garam mencapai Rp 1.200 per kg. Sebagian petambak kini menyimpan stok garam sisa produksi tahun 2020-2021 yang belum terserap dengan harapan harga garam terus membaik. Pihaknya optimistis produksi garam akan terus membaik tahun ini. Namun, upaya mendorong produksi dan mencapai swasembada garam harus ditopang oleh pengendalian impor garam. Hitung cermat Hasan menambahkan, pertumbuhan industri pengguna garam yang meningkat jangan dijadikan alasan pemerintah untuk memperbanyak impor. Pemerintah dinilai perlu menghitung cermat kebutuhan industri dan ketersediaan garam rakyat agar tidak ada yang dikorbankan. "Pertumbuhan industri pengguna garam yang semakin banyak jangan sampai mengorbankan produksi garam dalam negeri dan mendorong harga kembali anjlok," katanya. Pihaknya berharap pemerintah segera merealisasikan janji untuk memasukkan garam sebagai barang kebutuhan pokok serta menetapkan harga pokok pembelian. Jika harga garam stabil, petambak akan memacu produksi. Di sisi lain, pembatasan impor diperlukan agar garam rakyat terserap dengan harga layak. (LKT)